

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Iklm demokrasi ditandai oleh adanya kebebasan berpendapat. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat tentang institusi negara ataupun swasta. Memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam dipenuhidengan pemberian pemerintah hak untuk kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama pascaamandemen UUDN RI 1945. Kebebasan mewujudkan berbicara tentang kelahiran berbagai infrastruktur di negara-negara yang memiliki peran mengawasi pemerintah negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, LSM, dan sebagainya. Namun, kebebasan berekspresi sering disalahpahami sebagai kebebasan berekspresi apapun, sehingga sering merugikan diskusi publik yang terkandung pejabat atau pemimpin organisasi masyarakat, juga merugikan warga biasa . Jika tidak ada kebebasan berpedapat didirikan, adalah mungkin konflik berlarut-larut yang damai mengganggu dan keamanan di masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum telah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga ketertiban agar hak-hak warga negara tidak terganggu oleh adanya kebebasan berpendapat. Disahkannya UU ITE. Undang-undang ini mengatur bagaimana orang memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

menyatakan kemerdekaan berpikir dan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi melalui penggunaan dan eksploitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan pendidikan bangsa dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum dari pengguna dan Sistem Operator Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bahwa undang-undang baru yang dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang meletakkan dasar-dasar konfigurasi bidang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perjalanan UU ITE mengalami masalah.

Hal ini jelas bahwa kebebasan berekspresi sangat dihargai US, sementara di Indonesia kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab di bawah aturan beralaku, jika AS sangat bebas tanpa kebebasan Batasan mengatur berpendapat, maka norma di Indonesia sangat banyak untuk menjadi sebuah pembatasan ini dari kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi di Indonesia dibuat pada orang-orang yang ambigu dan sering salah diidentifikasi.

Dan jika Anda masih diperdebatkan kebebasan berekspresi di Indonesia, karena ketika orang atau warga berpendapat maka mereka akan takut dicap sebagai penista dan dihukum karena pendapat mereka sendiri.

Kebebasan berpendapat mulai perubahan, terutama dengan munculnya media sosial. Euforia masyarakat untuk menyambut kehadiran media sosial sebagai sarana berekspresi dan berpendapat terbukti menyebabkan masalah

ketika bertentangan dengan ajaran hukum dan tidak disertai dengan tanggung jawab atas penggunaan media sosial. Pidato kebencian, pornografi dan berita penipuan begitu meluas di era jaringan sosial karena banyak orang dan kemudian saham atau komentar pada informasi yang negatif.

Di Amerika Serikat kebebasan saja berbicara adalah amandemen pertama tidak, maka ada kebebasan berekspresi benar-benar dikonfirmasi. Tes ini dapat dengan mudah dikritik presiden AS sebagai bagian dari kritik sosial atau bahkan hanya membuat presiden tertawaan. Warga negara tanpa menangkap presiden yang pandangan mencela dan menghina presiden AS.

Dalam rangka memfasilitasi pemahaman dan pembatasan penggunaan jaringan sosial, pemerintah mengatur aturan yang membatasi pelaksanaan hak untuk kebebasan berekspresi melalui UU ITE. Dengan media sosial, orang dengan mudah memberikan pendapat atau pendapat menshare, untuk merugikan orang lain. Undang-Undang mengandung ketentuan-ketentuan yang melarang ITE mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat kurangnya akses untuk menghina informasi elektronik dan / atau pencemaran nama baik dikenakan dengan ketentuan Pasal 27.

UU ITE dalam Pasal 40 juga mengatur peran pemerintah dalam melindungi gangguan dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan memasukkan kekuatan tambahan: 1) Pemerintah wajib mengambil penyebaran informasi elektronik preventif memiliki beban dilarang; dua). Pemerintah berwenang untuk menghentikan akses dan / atau meminta operator dari Sistem Elektronik untuk menghentikan akses ke informasi elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar hukum. Pembatasan ini tampaknya bertentangan dengan upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan bertentangan dengan iklim demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan kebebasan berpendapat di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat ?
2. Bagaimana batas-batas kebebasan berpendapat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bagaimana implikasi terhadap sanksi dan penerapannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana kebebasan berpendapat yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada warga negaranya serta mengetahui perbedaan kebebasan berpendapat di Indonesia dengan dengan kebebasan berpendapat di Amerika Serikat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas kebebasan berbicara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pihak penegak hukum dalam menerapkan UU ITE, agar dapat sesuai dengan rasa keadilan yang ingin ditegakkan.
2. Bagi masyarakat agar tidak menggunakan kebebasan berpendapat sehingga melanggar pihak lain yang berujung pada ancaman pidana.

#### **E. Metode Penulisan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>2</sup>

##### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008. Hlm 33

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press. 2006, hlm. 51

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kebebasan berpendapat. yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian pustaka. berhubungan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.<sup>3</sup> Dalam hal ini, persoalan yang diteliti yaitu batas-batas kebebasan berbicara. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yakni tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang dipandang telah membungkam hak kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memiliki ciri-ciri (Soejono Soekanto, 2006: 28) “Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka, Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, Data sekunder tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.”

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.70

#### 4. Sumber Data

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang timbul. Jadi untuk menyelesaikan masalah undang-undang dan untuk preskripsi tentang apa yang harus diberikan kepada isu-isu Penelitian sumber yang diperlukan.<sup>4</sup> Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber-sumber penelitian yang digunakan antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari UUD NKRI Tahun 1945, undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- b. Bahan hukum sekunder: data hukum yang sudah ada di dalam buku atau laporan yang sudah pernah diteliti oleh seseorang
- c. Bahan hukum tersier adalah koleksi dan kompilasi sumber primer dan sekunder Hal ini memberikan bimbingan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan kamus hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar mempermudah para pembaca dalam

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 141

mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini adalah pengenalan studi ini dijelaskan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penulisan hukum yang sistematis.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kajian literatur terdiri daripada: 1). Kebebasan pendapat Survey, 2). Tinjauan Pusat Media, 3). Tinjauan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 ITE, 4). Tinjauan Undang-undang No. 19 tahun 2016 mengenai pindaan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kerangka Pemikiran.

**BAB III : PEMBAHASAN.** Bab ini menerangkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di UU ITE.

**BAB IV : PENUTUP.** Bab terakhir berisi deskripsi ringkasan dan diskusi tentang isu-isu yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisi saran-saran yang dapat memberikan peneliti permasalahan yang diteliti oleh para peneliti.

#### **G. Originalitas Penelitian**

No	Nama	Tahun	Judul	Fokus Kajian
1	Putu Eva Ditayani Antari	2017	Tinjauan Yuridis Pembatasan	Pembatasan-pembatasan mengenai penggunaan hak



			Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia	atas kebebasan berserikat oleh warga negara di Indonesia. Pembatasan kebebasan berpendapat pada media social, serta menganalisis relevansi antara pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan penegakan ajaran negara hukum.
2	Peiroll Gerard Notanubun	2014	Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945	Kebebasan berbicara dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat 3 UU ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan

3	Suhendri	2019	Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi Di Indonesia	Kewajiban negara yang sudah dilakukan dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia, yang sesungguhnya telah di jamin dan di lindungi oleh Konstitusi sebagai Hak Asasi Manusia,
4	Aris Setyo Nugroho	2010	Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.